

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ *Islam dan Politik luar negeri Indonesia (Studi kasus : kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Suriah)* ” penulis memiliki beberapa pertimbangan dalam mengangkat judul tersebut di antaranya adalah secara historis politik di Indonesia tidak terpisahkan dengan islam karena peran islam dalam kemerdekaan NKRI sangat signifikan bahkan islam sebagai sebuah agama yang di jadikan pedoman hidup bagi sebagian besar masyarakat internasional tak terkecuali di Indonesia memiliki pengaruh yang besar.

islam pun telah menjadi sebagai sebuah subyek yang sangat banyak di teliti oleh sebagian besar pakar dalam ilmu hubungan internasional, hal ini menimbulkan ketertarikan tersendiri dalam melihat islam dari berbagai perspektif sehingga menjadikan islam menarik untuk di kaji dari sisi pengaruh yang di timbulkan dalam mengartikulasikan kepentingannya. dalam pandangan penulis menjadi sebuah keunikan jika sebuah agama dalam hal ini islam yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang di atur dalam agamanya berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia yang bukan negara islam, dengan berbagai macam aktor yang memiliki kesamaan tujuan yang berlandaskan pada keyakinan dan identitas yang sama.

Para *the founding fathers* yang mayoritasnya beragama islam di indonesia salah satunya Muhammad Hatta telah merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia yang di cetuskan sebagai kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, prinsip yang merupakam sebuah dasar arah kebijakan

yang menggambarkan kondisi historis yang di alami Indonesia pada masa perang dingin dengan tidak memihak pada blok barat maupun blok timur, namun sesungguhnya dasar arah kebijakan Indonesia yang bebas dan aktif perlu di cermati lebih dalam mengingat berbeda situasi yang di alami indoneia pada saat perang dingin dengan saat ini, karena dasar kebijakan luar negeri Indonesia telah banyak mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam keberpihakannya pada negara-negara barat yang telah memenangkan situasi pada masa perang dingin yakni Amerika Serikat dan sekutunya sehingga sering kali keluar dari koridor pembukaan UUD 1945 namun kebijakan luar negeri Indonesia tentunya di dorong oleh beberapa faktor di antaranya adalah kondisi politik domestik di Indonesia yang banyak di pengaruhi oleh berbagai macam aktor yang memiliki tujuan dan identitas yang relatif berbeda tanpa terkecuali islam yang menjadi penganut terbesar di Indonesia yang terkadang sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia.

Peran Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya beragama islam dapat di amati lewat beberapa konflik yang terjadi di Timur Tengah salah satunya konflik yang terjadi di Suriah, konflik yang berkepanjangan antara rezim penguasa dengan pihak oposisi ini menjadi isu internasional yang sangat rumit untuk di selesaikan, sampai saat ini PBB berusaha mempertemukan antara pihak oposisi dan pemerintah Suriah di Genewa namun masih kandas hingga saat ini, menarik untuk di kaji peran Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya bergama islam yang memiliki ikatan persaudaraan yang begitu kuat yang di atur dalam agamanya apakah memiliki kontribusi yang signifikan ataukah Indonesia yang mayoritasnya penduduk islam terbesar di dunia tidak memiliki pengaruh dan tidak memainkan peranan penting dalam konflik yang terjadi di Suriah yang telah banyak menelan korban umat islam.

B. Tujuan Penulisan

Sebuah penulisan karya ilmiah dilakukan memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah hasil yang objektif dari berbagai fenomena yang di amati melalui serangkaian penelitian, sehingga penulisan ilmiah ini memiliki tujuan di antaranya :

1. Memberikan penjelasan tentang pengaruh nilai dan norma dalam membentuk perilaku aktor internasional
2. Untuk mengetahui pengaruh islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia
3. Dan untuk mengetahui peran Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Suriah

C. Latar Belakang Masalah

Islam dan politik di Indonesia tidak bisa di pisahkan satu dengan yang lain, hal ini karena peran islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan indonesia begitu signifikan yang kemudian ikut andil dalam pembentukan dasar negara indonesia, para *the founding fathers* dan para ulama di indonesia bahkan hampir merumuskan dasar negara yang berdasarkan syariat islam, hal ini bisa di lihat dalam piagam jakarta 22 juni 1945 yang pada awalnya mencetuskan sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya namun karena pertimbangan integritas wilayah Indonesia yang bisa terancam maka Pancasila menjadi titik temu antara islam dan ideologi yang lain sebagaimana kutipan pidato Soekarno di bawah ini :

“Negara yang kita ingini ialah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah yang penduduk-penduduknya tidak beragama Islam akan melancarkan diri misalnya Maluku, Bali, Flores, Timor, Sulawesi dan juga

Irian Barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik” Pidato 27 Januari 1953, Amuntai (Kalimantan Selatan)” (Ir. Soekarno)

Oleh karena itu, Pancasila ternyata justru memiliki relevansi yang sangat kuat dengan agama, dalam hal ini maka relasi antara Islam dan Negara tetap berada di dalam coraknya yang simbiosis mutualisme. hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ulama-ulama NU, misalnya Kyai Sahal Mahfudl dan juga pimpinan Muhammadiyah, Dien Syamsudin bahwa relasi antara Islam dan negara adalah dalam coraknya yang simbiosis.¹

Semenjak awal, Indonesia memang memilih relasi antara Islam dan politik dalam coraknya yang simbiosis mutualisme. Hal ini tentu saja didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Islam yang di dalam bermadzab mengikuti pandangan *ahl sunnah wa al jamaah*, ulama-ulama Islam Indonesia, sebagaimana di dalam penetapan UUD 1945 dalam banyak hal mengikuti pandangan moderatisme Islam dengan tidak mengharuskan formalisme agama.

Dewi Fortuna Anwar, menyebutkan bahwa muslim Indonesia adalah muslim moderat, toleran, yang memiliki wawasan ke luar, ia menyandarkan pendapat ini pada fakta bahwa walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun Indonesia bukan sebuah negara islam dan tidak menempatkan islam sebagai agama resmi negara² ia mempertegas pendapat tersebut dengan memperlihatkan bahwa, indonesia dalam upaya untuk mencapai titik temu antara mereka yang menginginkan berdirinya negara islam dengan kelompok yang menentang gagasan tersebut, merumuskan sebuah ideologi yang di beri nama Pancasila, ideologi yang tidak

¹ Nur Syam, M,Si dalam <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=1878>,. di akses pada Hari Rabu,30-10-2013

² Novandre Satria dan Ahmad Jamaan dalam : *islam dan kebijakan luar negeri Indonesia : peran Indonesia dalam*

sepenuhnya sekuler, dengan 'Ketuhanan yang Maha Esa' sebagai poin pertama dari lima sila yang di kandungnya, sebagai pengejawantahan dari sila pertama ini yakni, negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memilih dan secara sadar memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan dan berusaha memaksakan keyakinan tersebut kepada orang lain³

Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai (*penetration pacifique*) lewat akulturasi budaya yang sangat persuasif sehingga konsekuensinya menjadi akomodatif dan lunak hal ini menjadikan Islam bisa di terima di Nusantara terbukti Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah penganut Islam terbesar di dunia, jumlahnya bahkan hampir menyamai jumlah total seluruh penganut Islam di negara-negara berbahasa Arab yakni mencapai 207.176.162⁴

Hal ini berbanding lurus dengan komposisi anggota DPR yang ada di parlemen walaupun pada dasarnya setiap individu yang duduk di DPR merupakan perwakilan langsung dari partai-partai dan bertanggung jawab untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan partai mereka masing-masing dalam perlemen, dengan demikian terkotak-kotak dalam warna dan ideologi partai namun sejatinya, masing-masing dari mereka merupakan refleksi dari konstituen yang mereka wakikan, hasil survey yang di selenggarakan oleh Tim ITB-UNPAD terhadap komposisi anggota DPR RI periode 2009-2014 menunjukkan bahwa 83,96% anggota DPR adalah pemeluk agama Islam.

Indonesia juga merupakan rumah bagi organisasi Islam dengan jumlah keanggotaan terbesar di dunia, Nahdatul Ulama (NU) yang didirikan untuk mempertahankan Islam tradisional yang di praktekkan oleh Ulama-ulama konservatif sedangkan meningkatnya pengaruh gerakan

³ Ibid

⁴ Ibid, hal 5

Islam modernis yang di usung oleh Muhammadiyah yakni organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah NU namun terlebih dahulu terbentuk yakni pada tahun 1912 menjadikan kedua organisasi ini sangat di perhitungkan di Indonesia, hal ini menjadikan Islam mempunyai *bargaining position* yang cukup kuat dalam mempengaruhi politik domestik maupun kebijakan luar negeri Indonesia.

Hal ini di perkuat oleh beberapa kasus yang menguatkan Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana konflik yang terjadi di Myanmar ketika Muslim Rohingnya yang berada di provinsi Rakhine mengalami penindasan dan pengusiran oleh militer dan pemerintah Myanmar hal ini kemudian menjadi respon yang signifikan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim yang kemudian mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar dengan mengembalikan hak-hak Muslim Rohingnya yang di diskriminasi oleh pemerintah Myanmar.

Selain kasus di atas Indonesia juga berperan aktif dalam kegiatan OKI terkait pembahasan mengenai friksi dan gesekan antara pemerintah Filipina dengan kelompok minoritas Muslim Moro yang bernaung dalam wadah *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina Selatan⁵, Indonesia juga sampai saat ini tetap bersikukuh dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel yang berarti menjadikan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya tidak hanya sekedar daerah otoritas yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Sejalan dengan itu Indonesia tetap konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga negara Palestina yang berdomisili di jalur Gaza berupa bahan pangan, selimut, obat-

diplomasi antara Indonesia dan Israel, dalam kasus ini upaya pemerintah rezim Abdurrahman Wahid mencoba untuk membuka dan menjalin kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Israel namun dikecam keras oleh berbagai elemen masyarakat, ormas-ormas Islam dan parlemen Indonesia, kecaman ini berujung pada kandasnya rencana kerjasama tersebut⁶

Saat ini perhatian dunia internasional tertuju pada konflik yang terjadi di Timur Tengah, konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini khususnya di Suriah telah banyak menimbulkan respon dari berbagai pihak, masyarakat internasional pun mengucilkan Suriah setelah krisis politik yang telah berlangsung lebih dari 14 bulan di negara tersebut menewaskan lebih dari 7.500 orang warga negaranya. Puncak kemarahan dunia adalah terjadinya 'Tragedi Houla' di Provinsi Homs, dengan korban lebih dari 100 orang warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak akibat pembantaian pihak militer.

Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga saat ini belum berhasil mencari solusi damai atas masalah Suriah, sehingga upaya mengatasi krisis politik di Suriah melalui cara intervensi militer mulai dipertimbangkan.⁷ hingga akhirnya Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya mengambil kebijakan dengan menyerang Suriah dengan alasan adanya pemakaian senjata kimia oleh militer Suriah yang di gunakan untuk menyerang warga sipil, konflik Suriah masih berlangsung. Akhir pekan lalu 15 orang meregang nyawa dalam bentrokan antara kelompok oposisi dan pasukan militer. Tanpa pandang bulu, pasukan Bashar Al Assad juga menyasar perempuan dan anak-anak. PBB sendiri mengklaim konflik ini telah menelan sedikitnya 100 ribu nyawa.

⁶ Ibid hlm 7

⁷ Lihat di : (Adirini Pujayanti) http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-11-I-P3DI-juni-2012-16.pdf (di akses pada : 31,Oktober,2013)

Namun hingga saat ini, belum ada resolusi nyata untuk menghentikan perang saudara ini. hal ini mendorong masyarakat indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik tersebut sebagaimana yang di lakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan ormas-ormas islam untuk mengartikulasikan kepentingannya pada pemerintah untuk mengambil sikap tegas kepada Rezim Bashar Al-Assad yang berbuat zalim kepada rakyat Suriah sehingga telah banyak memakan korban jiwa.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mendorong keterlibatan pemerintah Indonesia untuk membantu menyelesaikan konflik Suriah yang saat ini sudah menelan korban lebih dari 100 ribu nyawa “saat ini masih ada kesempatan sebelum terlambat” dalam konferensi pers setelah pembukaan rapat pleno PBNU, beliau menegaskan, langkah militer yang digagas oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya tidak menyelesaikan masalah, “dialog merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ini” Kiai Said Aqil berharap pemerintah indonesia berperan lebih aktif dalam mendorong negara-negara muslim secara bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.

Sedangkan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyampaikan pandangannya atas peristiwa penggunaan senjata kimia yang telah menelan ribuan korban jiwa ini “saya kira kita harus menolak tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun, terutama penggunaan senjata kimia” oleh karena itu, tindakan ini harus di kecam, tapi harus ada verifikasi siapa yang melakukan serangan jangan sampai asal tuduh,” tambahnya. Beliau juga menyatakan, ada baiknya bila seluruh pihak menunggu hasil yang di keluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum mengambil sikap menyerang.

Ketika di singgung tentang rencana intervensi asing Din langsung menolak. "invasi asing pada Suriah tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan hanya akan menambah masalah baru," dirinya berharap, PBB bisa bertindak tegas untuk menentukan siapa yang menggunakan senjata kimia dan juga mencegah serangan asing ke Suriah di ketahui, pernyataan Din Syamsudin mengenai kecaman terhadap penggunaan senjata kimia adalah pernyataan kedua yang di keluarkan oleh organisasi muslim di indonesia, sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Muslim (HMI) juga sudah menyatakan mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin juga mengaku kecewa terhadap upaya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi konflik di Suriah. untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah itu, Din berharap dunia Arab dan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI mengambil langkah kongkrit agar korban tidak terus berjatuhan. "Indonesia dalam posisi yang diharapkan. Seyogyanya pemerintah mengambil langkah-langkah. tapi kita kecewa langkah yang diambil belum maksimal, kita tidak ingin pemerintah berpihak, minimal ada dialog,"⁸

Akumulasi dari reaksi maupun dorongan dari dalam negeri dalam hal ini masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang di representasi oleh dua raksasa organisasi islam Indonesia Muhammadiyah dan NU menjadikan indonesia berperan aktif dalam konflik Suriah hal ini dapat di rangkum dalam beberapa aktifitas politik luar negeri Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Suriah :

⁸ Lihat di : <http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/konflik-suriah-muhammadiyah-kecewa-pada-pemerinta>, : di akses pada senin, 28-10-2013

1. Indonesia Abstain dalam Resolusi DK PBB untuk membentuk NC di Suriah yang kemudian Indonesia aktif dalam menjadi misi pemantau PBB terhadap konflik Suriah
2. Sikap Indonesia dalam krisis Suriah sangat jelas, menolak kekerasan terhadap masyarakat sipil dan mendukung solusi damai yang mencerminkan aspirasi rakyat Suriah. Indonesia mendukung upaya PBB dalam mencari solusi damai dan menekankan perlu dilakukan suatu konferensi internasional yang bersifat inklusif untuk menyatukan pandangan masyarakat internasional dalam masalah Suriah.
3. Paska meledaknya konflik yang terjadi di Suriah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa langsung ke Dewan keamanan PBB untuk membahas krisis yang terjadi di Suriah, Marty menegaskan, Indonesia akan berperan penting dalam pembahasan konflik Suriah dalam pertemuan tersebut, Indonesia berada dalam posisi mendesak penyelesaian politik secara damai, bukan dengan agresi militer dalam konflik Suriah.⁹ Hal ini menandakan indonesia bersikap sangat cenderung pada *soft power* untuk mewacanakan negosiasi secara politik
4. Indonesia juga ikut andil dalam mengirimkan pimpinan delegasi indonesia yakni wakil menteri luar negeri Wardana pada pertemuan para menlu OKI ke-40 di Conarkry, Gunea, indonesia dalam pertemuan tersebut memberikan usulan agar mengedepankan dialog antar agama dan keyakinan untuk menunjukan pada dunia bahwa islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi,

⁹ Lihat di : <http://news.liputan6.com/read/701753/video-bahas-konflik-suriah-menlu-marty-ke-dewan-keamanan-pbb/?related=pbr&channel=n> di akses pada (31,Oktober 2013)

Indonesia menyerukan perdamaian dunia melalui solusi politik damai yang inklusif.¹⁰

5. Dalam pertemuan G20 di Rusia, presiden SBY menegaskan penolakannya atas upaya penyelesaian konflik Suriah dengan cara-cara kekerasan, SBY memberikan usulan jalur alternatif dalam penyelesaian konflik Suriah dengan negosiasi antara pihak yang berkonflik hal ini karena intervensi asing apalagi tanpa mandat dari PBB, “menurut pandangan presiden SBY adalah masyarakat internasional (international community) yang di berikan mandat oleh perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan sejumlah tugas, yang mengandung tiga elemen tadi tentu tidak semua di laksanakan oleh international community, selebihnya di laksanakan oleh bangsa Suriah, pemerintah Suriah, pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Suriah sendiri,”kata Presiden dalam keterangan pers di St Petersburg.¹¹
6. Presiden SBY juga menyerukan negosiasi secara damai dalam konflik Suriah dalam pertemuan pada sesi debat hari pertama sidang ke-67 Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York, dan mendesak dewan keamanan PBB untuk menjalankan perannya untuk menciptakan perdamaian dunia
7. Indonesia memberikan usulan langsung pada Suriah untuk mengedepankan negosiasi secara damai yang kemudian di respon positive oleh Suriah
8. Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan secara tegas bahwa konflik di Suriah harus di selesaikan lewat jalan politik karena dapat menciptakan ekstremisme di

¹⁰ www.The-global-review.com (di akses : Jumat, 03-01-2014)

berbagai belahan dunia maka harus di selesaikan dengan diplomasi yang akhirnya konflik ini memerlukan upaya diplomasi bukan kekerasan

Bahkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala negara dan pemerintahan telah mengeluarkan pernyataan sikap bahwa "meski Indonesia secara geografis tidak terletak di Timur Tengah, tidak seperti Turki atau Iran yang berbatasan langsung, tapi Indonesia peduli pada Suriah," meski Indonesia juga bukan anggota Dewan Keamanan PBB, dan pemegang hak veto, Indonesia tetap peduli pada Suriah karena ada kewajiban moral, dengan dua alasan." alasan Indonesia peduli Suriah, 1. Kita, negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, dan 2. Amanat konstitusi UUD 1945 tentang perdamaian." dalam situasi saat ini, penggunaan kekuatan militer untuk serang Suriah tanpa mandat PBB, apalagi dengan tujuan untuk menghukum, adalah tidak tepat."¹²

Menariknya kebijakan luar negeri indonesia memiliki kesamaan dengan aspirasi mayoritas ummat islam di Indonesia, hal ini penting untuk di kaji lebih dalam karena islam memiliki ruang yang besar terhadap politik domestik yang di gerakan oleh kelompok islam dalam menciptakan opini publik dan dalam proses perumusan kebijakan indonesia, terkait kebijakan luar negeri indonesia di Suriah yang sampai saat ini masih bergejolak.

¹² <http://www.kaskus.co.id/thread/522ad3e1fdca175f5f000006/hot-akhirnya-indonesia-memutuskan-sikap-terhadap-konflik-di-suriah/> di akses pada (31 Oktober 2013)

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka muncullah permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini dengan sebuah pertanyaan “ **Mengapa kebijakan luar negeri Indonesia cenderung mendesak negosiasi damai dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Suriah ?** ”

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori Kebijakan Luar Negeri

Secara epistemologis Istilah luar negeri (*foreign*) dimaksudkan sebagai penerapan kebijakan yang dilakukan di luar batas teritorial negara, misalnya penandatanganan perjanjian internasional Sedangkan kebijakan (*policy*) memiliki arti yang luas dapat berarti berbagai macam kegiatan. Arti dari kebijakan dapat berarti keputusan spesifik untuk menandatangani perjanjian, atau pedoman umum dalam mengambil inisiatif, atau pernyataan lisan yang belum tentu mengarah pada tindakan selanjutnya, misalnya kecaman Turki terhadap kasus Israel-Palestina (Kaarbo et al, 2012: 2- 4).

Kebijakan luar negeri adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan

nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.

Biasanya, tugas menciptakan kebijakan luar negeri adalah wewenang kepala pemerintahan dan menteri luar negeri (atau jabatan yang setara). Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di Perancis dan Finlandia, dimana kepala negara adalah yang bertanggung-jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintahan bertanggung-jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, kepala negara (yaitu Presiden) juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.¹³

Proses pengambilan keputusan sebuah Negara tidak terlepas dari berbagai macam pilihan yang rasional maupun irasional, untuk dapat mengetahui fenomena semacam ini perlu sebuah pisau analisis yang tepat dalam mengkaji fenomena perilaku negara yang terkadang dapat di jelaskan dengan mudah dan sederhana namun terkadang membutuhkan cara yang mendalam melihat semakin sulit dan kompleks dalam menganalisis perilaku sebuah Negara sehingga penelitian ini mencoba menguraikan teori kebijakan luar negeri yang di rujuk pada beberapa pakar yang kemudian menggunakan pendekatan konstruktivisme sebagai penyempurnaan dari kebijakan luar negeri yang sesungguhnya lahir dari pembuat keputusan dalam negerinya.

Untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Suriah maka perlu memahami dengan baik konsep dari kebijakan luar negeri itu sendiri berikut akan di paparkan beberapa para ahli yang menjelaskan tentang konsep dari kebijakan luar negeri di antaranya sebagai berikut :

¹³ https://id.wikimedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri diakses pada : Jumat, 11.03.2016

- Menurut William D.Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari domestic politics, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer.¹⁴
- Marijke Breuning juga mencoba mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai totalitas kebijakan suatu negara terhadap dan untuk berinteraksi dengan lingkungan diluar batas wilayah kedaulatannya (Breuning, 2007:5).
- Bernard C. Cohen menyebutkan bahwa *'is that foreign policy is "more important" than other policy areas because it concerns national interests, rather than special interests, and more fundamental values'* (Cohen, 1968: 530 dalam Carlsnaes, 2002: 334).¹⁵
- Holsti memaparkan bahwa kebijakan luar negeri sebuah Negara sesungguhnya di pengaruhi oleh factor domestic dan eksternal kedua variabel ini saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain dengan berbagai macam elemen yang menentukannya
- Menurut James N Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain.¹⁶

Secara sederhana dapat di lihat bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara, mengalami kompleksitas yang berarti ketika isu yang di hadapi juga mengalami kekuatan kepentingan yang kuat dari berbagai macam aktor yang terlibat di dalamnya sehingga semakin banyak pertimbangan yang di lihat baik dari segi materi maupun non materi yang semuanya terangkum

¹⁴ <http://unique-21.blogspot.com/2011/12/proses-kebijakan-luar-negeri-menurut.html>. Di akses : 17-03-2014

¹⁵ <http://sonia-d-a-fisip11.web.unair.ac.id/artikel>. Di akses pada : 14-03-2014

¹⁶ <http://iwansmile.wordpress.com/teori-kebijakan-luar-negeri/> di akses : 17-03-2014

dalam aktifitas kebijakan luar negeri sebuah negara dalam implementasinya terkadang juga mengalami perubahan-perubahan yang berarti jika peristiwa yang terjadi menuntut perubahan sikap oleh negara yang bersangkutan untuk menemukan titik temu atau solusi terbaik dalam berbagai macam peristiwa yang di alami, namun terkadang negara yang tetap konsisten dalam pendiriannya dalam menjalankan aktifitas kebijakan luar negerinya cenderung memiliki pertimbangan yang kuat dan prinsip yang di dorong oleh berbagai macam kelompok kepentingan maupun masyarakat yang berada di dalam negaranya.¹⁷

Konstruksi sosial di dukung bahkan berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sebuah negara hal ini karena (FPDM) di pengaruhi oleh beberapa factor di antaranya : kepribadian pemimpin, lingkungan kebijakan luar negeri, factor internasional dan domestik, dalam hal ini politik dalam negeri, kondisi ekonomi, dan opini publik adalah salah satu factor domestic yang paling penting yang membentuk pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, Stephen Walker dan Mark Schafer menunjukkan bahwa kepercayaan sebagai disposisi internal yang terletak dalam diri individu dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri¹⁸ factor-faktor seperti kepribadian dan keyakinan para pemimpin, gaya kepemimpinan, emosi, gambar, konsistensi kognitif, dan penggunaan analogi mempengaruhi bentuk keputusan kebijakan luar negeri.

Dalam konteks Indonesia menurut Suryadinata, terdapat empat factor determinan yang setidaknya mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, yakni : (a) persepsi para pemimpin Indonesia atas wilayah geografis, (b) peran Indonesia dalam masalah-masalah internasional, (c) hambatan-hambatan atas perilaku pemimpin, dan (d) budaya politik masyarakat Indonesia dan

¹⁷ Ibid. hal. 10

¹⁸ Stephen Walker dan Mark Schafer, *Trust and Foreign Policy*, Praeger, New York, 1998.

elit.¹⁹ dari keempat faktor di atas dalam melihat konflik yang terjadi di Suriah, budaya politik masyarakat Indonesia setidaknya memiliki pengaruh yang cukup besar hal ini ditopang oleh demokratisasi di Indonesia pasca perubahan rezim pada tahun 1998 memiliki pengaruh signifikan, ia membuka ruang yang lebih besar bagi media, opini, dan partisipasi publik untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan.

Pendekatan Konstruktivisme

Politik internasional sesungguhnya di pandu oleh inter-subjektif bersama dan dilembagakan oleh norma, aturan, ide, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh aktor (Agen), sehingga inter-subjektif merupakan hasil pemikiran (realita) yang berasal dari orang-orang (*citizen*), Konstruktifis menggariskan bahwa ide-ide kolektif yang didirikan di dunia sosial sebagai struktur atau lembaga sehingga norma dan aturan menetapkan harapan tentang bagaimana dunia bekerja dan apa yang merupakan perilaku yang sah. Alhasil normatif dan faktor ideasional adalah sebagai faktor yang terpenting karena dari struktur materi (populasi, geografi, senjata dan lain-lain yang tunduk pada interpretasi).²⁰

Konstruktivisme melihat struktur sebagai sebuah hubungan sosial dan makna bersama dimana elemen ini dapat mencakup sekelompok aturan, norma, keyakinan berprinsip, pengetahuan bersama, praktek, bahkan unsur materi yang diperoleh dari sumber bahan yang dimaknai bagi tindakan manusia hanya melalui struktur pengetahuan bersama, sebagai contoh sistem internasional yang anarki dalam politik internasional dapat dilihat sebagai anarkis, tetapi

¹⁹ Leo Suryadinata. 1998. *Politik Luar negeri Indonesia di bawah Soeharto*. Jakarta : Pustaka LP3ES. Hlm.7. lihat juga Muhammad Faris Alfadh. 2012 dalam : *persepsi gerakan mahasiswa islam terhadap politik luar negeri Indonesia di timur tengah*. Yogyakarta : Prudent Media. Hlm.111.

²⁰ Paul R, Viotti, Mark V, Kauppi. *International Relation Theory*, 2010, New York, Pearson Education, hlm.280

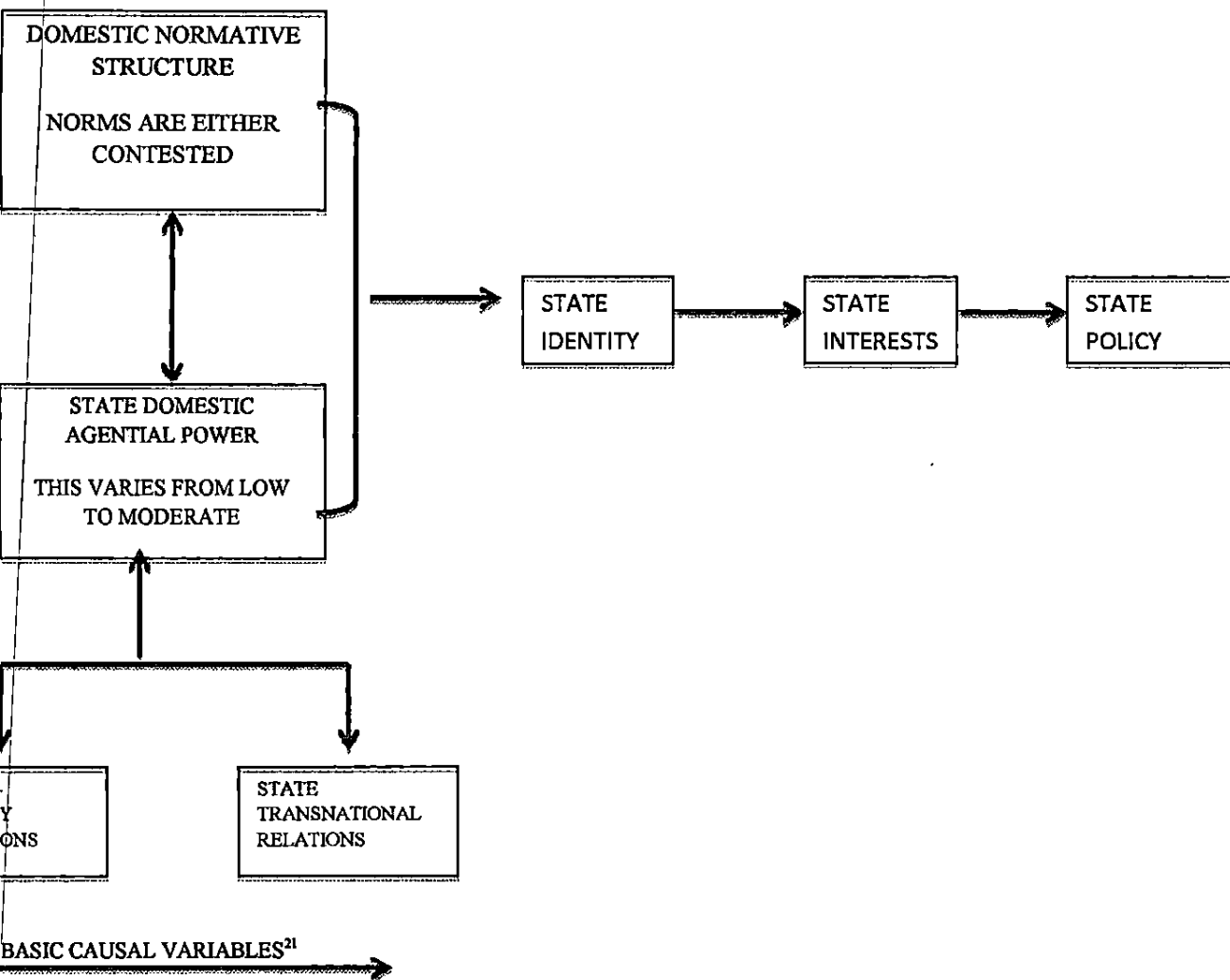
struktur dasarnya didefinisikan dalam jangka budaya, ini adalah hasil konstruksi social dan di beri makna oleh pelaku berbeda ketika di maknai politik internasional yang bernuansa Kantian.

Pandangan konstruktivisme terhadap agen sangat beragam dari negara sampai pada tingkat individu semua agen memiliki potensi untuk mempengaruhi penciptaan struktur internasional : norma-norma, identitas, perilaku negara, agen dan struktur saling membentuk satu sama lain, ada hubungan timbal balik antara agen dan struktur, logika yang di bangun dalam konstruktivisme yakni logika konsekuensi di mana tindakan di dorong oleh aktor rasional yang memberi peringkat dalam preferensi sementara menyadari bahwa aktor lain melakukan hal yang sama.

Selain itu logika ketepatan yakni tindakan di dorong oleh norma dan aturan, aktor manusia mengikuti norma-norma dan aturan yang mengasosiasikan identitas untuk situasi tertentu, tindakan yang tepat dalam konsepsi konstruktivisme adalah tindakan yang berbudi luhur. Sebagai contoh kongkrit Indonesia dan Malaysia yang sampai saat memiliki masalah perbatasan namun tidak saling menyerang atau menghukum satu sama lain karena melihat kedua wilayah yang serumpung yang juga memiliki kesamaan identitas baik agama maupun budaya sehingga tidak sesuai dengan norma-norma dan identitas jika kedua negara merekonstruksi sebagai lawan untuk saling menyerang.

Hal serupa bisa di lihat dalam konstruksi Negara dalam hal ini Amerika Serikat dan Kanada dalam menyamakan pengetahuan terhadap kesamaan nilai yang kemudian membentuk identitas yang mengeluarkan hasil sebagai Negara yang menjadi kawan ataupun lawan, Amerika Serikat melihat Kanada sebagai Negara yang memegang demokrasi sebagai nilai – nilai yang di terapkan dalam domestik politik Kanada sehingga memiliki kesamaan nilai berbeda dengan Korea Utara dengan komunisme sehingga kemudian menjadi kawan atau lawan dari AS.

Berikut ini akan di paparkan skema konstruktivisme yang dapat memahami perilaku Negara dalam melakukan aktifitas kebijakan luar negeri yang sesungguhnya tidak hanya berorientasi pada materi namun factor nilai, norma dan identitas memiliki pengaruh yang juga menentukan perilaku sebuah Negara :



Skema di atas memperlihatkan alur yang di jelaskan oleh paradigma Konstruktivisme dalam melihat perilaku Negara dalam aktifitas kebijakan luar negerinya Identitas memiliki pengaruh

²¹ Figure 5.5 Katzenstein's basic theoretical schema : John M. Hobson. 2003. *the state and international relations*. New York : Cambridge University press

yang signifikan namun relative stabil, karena ketika agen memahami dan mengenal identitasnya maka mengetahui kepentingannya hal ini di peroleh dari pemahaman spesifik peran dan harapan tentang diri sendiri dari interaksi atau mendefinisikan diri dalam hubungan dengan struktur terdiri dari hubungan social, berbagi makna, aturan, norma dan praktik,²² perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah contoh kasus bagaimana identitas antara liberalisme dan sosialisme merekonstruksi perilaku AS dan Uni Soviet. sehingga konstruktivisme mengklaim bahwa kepentingan aktor yang di bangun adalah untuk melakukan perubahan oleh pelaku sendiri karena aktor berinteraksi dengan orang lain yang inter-subjektif.

Konstruktivisme : Agama dan identitas

Argumen ini di bangun dengan berdasarkan pada pendekatan Konstruktivisme yang menggariskan bahwa perilaku suatu aktor internasional di konstitusikan oleh identitas yang di bentuk oleh nilai dan norma yang berlaku baik di wilayah struktural maupun di ranah sub-sistemik. analisa politik luar negeri pun di rangkai dalam kerangka pikir Konstruktivisme, di mana aktor tidak di anggap sebagai unit yang *goal-oriented* dan *self-oriented* yang perilakunya merupakan buah dari pertimbangan-pertimbangan rasional terhadap untung rugi dalam upaya memaksimalkan pencapaian, melainkan sebagai objek yang dalam perumusan kebijakannya selalu mempertimbangkan konteks sosial di mana ia berada²³

Mark Webber dan Michael Smith menguraikan bahwa aktor-aktor yang mempengaruhi dan seberapa besar pengaruh tersebut berdampak pada perumusan kebijakan luar negeri dengan

²² Paul R, Viotti , Mark V, Kaupp Ibid. hlm.286

²³ Novandre Satria dan Ahmad Jamaan dalam artikel : *islam dan kebijakan luar negeri Indonesia : peran Indonesia dalam konflik di Rakhine, Myanmar* hlm.3

membedakan entitas-entitas yang terkait dengan politik luar negeri , pembuat kebijakan yaitu mereka yang terlibat secara langsung, berkelanjutan dan efektif dan kelompok yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan tersebut dari waktu ke waktu²⁴ mereka menjabarkan bahwa aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan besarnya pengaruh aktor tersebut sangat bergantung pada isu yang diamati dan sistem politik domestik negara bersangkutan²⁵

Jonathan Fox dan Schmucl Sandler melihat bagaimana agama dapat memainkan peranan penting dalam hubungan internasional dengan melalui empat sisi, antara lain : *Religion is one of the sources of people's world view : religion is a source of identity : religion is a source of legitimacy : religion is associated with formal institution.* hal ini membuktikan bahwa agama sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia yang turut mempengaruhi perilaku manusia yang pada akhirnya mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan sebuah negara maupun aktor *non-state*.

F. Hipotesa

Kebijakan luar negeri indonesia cenderung mendesak upaya wacana negosiasi damai terhadap konflik yang terjadi di Suriah di sebabkan oleh dua faktor dominan di antaranya adalah :

1. Aktifitas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Suriah sesungguhnya sangat di pengaruhi oleh faktor domestic (opini public) yang

²⁴ Webber, Mark & Smith, Michael (ed).op.cit.,hlm.39.

²⁵ Webber, Mark & Smith, Michael (ed).op.cit.,hlm.39.

terkonstruksi oleh nilai-nilai universal islam di bandingkan factor-faktor yang bersifat materi

2. Agama, dalam hal ini islam di indonesia, memiliki pengaruh dalam politik luar negeri Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Suriah hal ini di karenakan konstruksi atas identitas indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan dorongan dari masyarakat maupun ormas-ormas islam yang memiliki pengaruh sebagaimana NU dan Muhammadiyah di indonesia.

G. Jangkauan Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membuat batasan di antaranya : dengan memfokuskan pada pengaruh islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Suriah sebagai objek pengamatan, hal ini di sebabkan karena hubungan antara Indonesia dan Suriah tidak hanya terikat pada hubungan diplomatic semata melainkan secara ideologis memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan muslim yang di atur dalam agama islam sehingga kebijakan luar negeri Indonesia sangat penting di lihat dari segi pengaruh islam dalam membentuknya menjadi titik focus dalam penelitian ini.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan panduan bagi peneliti tentang bagaimana penelitian di lakukan maka penulisan skripsi ini menggunakan analisis data sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang di dapat dari berbagai sumber, yaitu : melalui buku, literatur, jurnal, surat kabar harian, internet dan beberapa majalah untuk mendapatkan data-data

yang di perlukan dalam penelitian ini, penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yang di dasarkan pada suatu kerangka teori kemudian di tarik hipotesis yang akan di uji melalui data empiris.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah penelitian deskriptif, tulisan ini memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana bagian-bagian dari permasalahan yang diajukan, tulisan ini terdiri dari lima bab dengan sub bahasan sebagai berikut : pada bab I, di uraikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Pada bab II menguraikan tentang bagaimana ketersinggungan antara islam dan politik luar negeri Indonesia, pada bab III membahas tentang konflik yang terjadi di Suriah kemudian pada bab IV memberi analisis terkait pengaruh islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik di Suriah, pada bab V berupa kesimpulan.